

# 260 Tahun Kasultanan Yogyakarta

Oleh: Anton Haryono

Kamis Pahing, 12 Februari 2015  
HALAMAN 4

DUA ratus enam puluh tahun yang lalu, tepatnya 13 Februari 1755, berlangsung apa yang lazim disebut Perjanjian Giyanti, yakni suatu perjanjian antara VOC, Paku Buwana III, dan Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan perjanjian ini, kerajaan tunggal Jawa pedalaman kelanjutan dari Mataram Baru yang berpusat di Surakarta (sebelumnya secara berturut-turut berpusat di Kotagede, Kerta, Plered, dan Kartasura) dipecah menjadi dua. Wilayah di sebelah timur sungai Opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (Sunan Paku Buwana III) dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah di sebelah baratnya (daerah Mataram asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwana I yang berkedudukan di Yogyakarta.

Kehadiran VOC dengan kepentingan-kepentingan politik ekonominya yang dilakukan melalui serangkaian intervensi ke dalam tubuh kerajaan yang rentan konflik telah menyulut instabilitas akut dan berkepanjangan. Perang-perang suksesi/pergantian tahta senantiasa terjadi, tak terkecuali yang melatarbelakangi digelarnya Perjanjian Giyanti 1755, yang dalam sejarah Mataram sering disebut sebagai Perang Suksesi III. Politik pecah belah pada institusi negara (kerajaan) yang mudah pecah merupakan jalan paling mudah bagi VOC untuk meraup keuntungan dan hal ini tidak hanya diterapkan di Mataram, tetapi juga di kerajaan-kerajaan besar lain yang ada di Indonesia saat itu.

Sejak Perjanjian Giyanti 1755, Mataram tunggal tinggal kenangan. Meskipun pada masa-masa awal masih ada niat politik untuk menyatukan kembali tetapi niat itu tidak pernah terwujud. Bahkan Perjanjian Giyanti yang telah memecah "Mataram" menjadi dua kerajaan (Kasultanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta) belum mampu mengakhiri sengketa tahta dari para pewaris keagungan Senapati. Pangeran Sambernyawa masih memberontak dan untuk mengakhirinya harus ditempuh dengan digelarnya Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Dari perjanjian ini muncul kekuasaan baru di Surakarta, yakni Mangkunegara. Surakarta terpecah, dan Yogyakarta pun kelak akan menyusul, yakni dengan munculnya Kadipaten Pakualaman pada awal abad ke-19.

Selepas Perjanjian Giyanti 1755, yang kemudian disusul dengan Perjanjian Salatiga 1757, praktis keadaan Jawa pedalaman relatif damai. Perang-perang pergantian tahta yang mengurus banyak tenaga,

waktu, dan biaya telah berhenti. Namun, di balik itu, penetrasi VOC ataupun otoritas Belanda yang menggantikannya sejak awal abad ke-19 makin merasuk. Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta beserta pecahan masing-masing memang masih memiliki otonomi, dapat mengatur tata kenegaraannya sendiri, akan tetapi campur tangan yang semakin besar dari kekuatan VOC dan pemerintah kolonial tak terelakkan.

Dari sembilan pasal yang teruang dalam Perjanjian Giyanti, sebagian besar adalah pasal-pasal yang menguntungkan kepentingan VOC. Pasal 3 berisi keharusan bagi pepadat dalem dan para bupati sebelum melaksanakan tugas agar bersumpah setia kepada Kumpeni. Pasal 4 berisi keharusan bagi Sultan untuk memperoleh persetujuan Kumpeni sebelum mengangkat dan memberhentikan pepadat dalem dan bupati. Pasal 5 berisi tekanan politik agar Sultan mengampuni Bupati yang selama dalam peperangan memihak Kumpeni. Pasal 6 berisi klausul bahwa Sultan tidak akan menuntut haknya atas pulau Madura dan daerah-daerah pesisir, yang telah diserahkan oleh Paku Buwana II kepada Kumpeni dalam Contract-nya pada tanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya Kumpeni akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real tiap tahunnya. Pasal 8, Sri Sultan berjanji akan menjual kepada Kumpeni bahan-bahan makanan dengan harga tertentu. Pasal 9, Sultan berjanji akan mentaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara raja-raja Mataram terdahulu dengan Kumpeni, khususnya perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, 1749.

Pasal-pasal tersebut di atas memberi petunjuk yang jelas perihal kepentingan politik ekonomi VOC. Transformasi VOC dari sekedar pedagang menjadi entitas politik kekuasaan yang dibangun sebelum Perjanjian Giyanti 1755 semakin penetratif. Dalam keterbatasan langkah-langkah politik, Sultan Hamengku Buwana I selaku raja pertama Yogyakarta harus membangun negeri barunya sedemikian rupa memiliki "identitas nasional" yang berbeda dengan kerajaan Surakarta. Pekerjaan besar dan mendasar ini harus dilakukan karena sejak Perjanjian Giyanti 1755 Yogyakarta merupakan negara (kerajaan) tersendiri yang lepas dari Surakarta. Menjadi aneh jika selaku negara merdeka (lepas dari Surakarta) identitasnya sama seperti kerajaan Surakarta.

Rupa-rupanya persoalan menjadi pelik karena seluruh komponen pembentuk negeri Ngayogyakarta Hadiningrat sebelumnya adalah komponen integral dari kerajaan tunggal yang berpusat di Surakarta, yang tentu saja secara kultural telah lama menghidupi "identitas nasional" yang dibangun oleh kerajaan tunggal itu. Sejak Perjanjian Giyanti, anak turun Senapati beserta rakyat masing-masing harus memikirkan penanda aktualisasi budaya yang dapat membedakan antara Yogyakarta dan Surakarta dalam jagad budaya yang sama, budaya Jawa pedalaman. Pada masa-masa awal eksistensinya beban yang harus ditanggung oleh kerajaan Yogyakarta kiranya lebih berat. Sultan Hamengku Buwana I dan para penerusnya tidak hanya harus membangun keraton baru dengan tembok kotanya yang besar, tetapi juga harus memikirkan bagaimana relik-relik budaya Jawa diaktualisasikan secara khas. Bila kerajaan Surakarta tidak perlu membangun istana baru (karena sudah terbangun), maka besar kemungkinannya kerajaan itu juga tidak perlu susah-susah memikirkan aktualisasi budaya Jawa secara baru (tinggal meneruskan yang telah lama ada).

Bila kita kini menemukan sedemikian banyak perbedaan aktualisasi budaya antara Yogyakarta dan Surakarta, maka semua itu terutama bermula dari terbelahnya secara formal kerajaan warisan Senapati (Mataram Baru) di Jawa Tengah. Dari blangkon, surjan, kain batik, keris, paes dan pakaian temanten, gamelan, wayang, layar wayang, keprak wayang, aneka tari-tarian, makanan, dan sejumlah peristilahan orang dapat mengenali apakah itu "milik" Yogyakarta ataukah Surakarta. Bahkan, warna bendera penanda adanya orang meninggal pun berbeda antara sub kultur Jawa Yogyakarta (putih) dan Surakarta (merah). Pada perbedaan-perbedaan yang halus (tidak mudah dikenali oleh orang awam) kemudian disematkan peristilahan "gaya Surakarta" atau "gaya Yogyakarta".

Pertanyaan reflektif kita adalah, bila kerajaan Mataram tidak terpecah menjadi dua kerajaan yang masing-masing memiliki kedaulatannya sendiri, apakah perbedaan aktualisasi budaya Jawa akan terjadi sedemikian detail? Bila jawabannya "tidak", maka dapat dikatakan bahwa perbedaan-perbedaan yang dihidupi, terutama selama eksistensi kenegaraan masing-masing masih kuat, berada dalam konteks terbangunnya "identitas



nasional" dari setiap negara (kerajaan) tersebut. Kesamaan-kesamaan diberi detail perbedaan. Semua mewarisi budaya Jawa dan pada saat yang sama masing-masing memiliki kekhasannya sendiri.

Yogyakarta mutakhir, yang secara formal memiliki status "Daerah Istimewa" kiranya perlu mewarisi yang telah dirintis oleh Pangeran Mangkubumi sejak beliau secara definitif menjadi raja pembangun wangsa Kasultanan Yogyakarta. Sarana dan prasarana fisik memang beliau upayakan secara serius dan penuh semangat. Namun, yang tidak kalah penting adalah prakarsa-prakarsa kulturalnya dalam membangun Yogyakarta sedemikian rupa memiliki karakter yang kuat. Salah satu karakter kuat yang dibangunnya adalah laku prihatin dan kesederhanaan, pengutamaan kedalaman sekaligus kebersahajaan.

Menemukan kepribadian dengan penuh perjuangan, bukannya enak-enak menyontek apapun yang dapat disontek, adalah jiwa Sultan Hamengku Buwana I. Tentu saja dalam gerak politik dan kebudayaan kontribusi besar juga disumbangkan oleh segenap rakyat yang hidup dan menghidupi konsep *jumbuhing kawula lan gusti*. Konsep inipun masih sangat relevan untuk dirawat, dikembangkan, dan diaktualisasikan secara baru dalam konteks realisasi kaya kearifan "Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa". Agar konsep warisan leluhur tersebut dapat teraktualisasi, maka "Tahta untuk Rakyat" sebagaimana diteladankan oleh Sultan Hamengku Buwana IX merupakan keniscayaan.

Dua ratus enam puluh tahun yang lalu Yogyakarta kembali menjadi salah satu negara (kerajaan) yang terus membangun diri dalam paradigma kebudayaan yang khas. Berbagai bentuk intervensi VOC/ kolonial Belanda tidak menghalangi prakarsa-prakarsa sosio kultural (ke-Jawa-an) yang kreatif, bijaksana, dan panjang usia. Pada waktunya dulu, setiap prakarsa pada hakekatnya adalah kebaruan, tetapi kebaruan yang berpijak pada warisan lokal jenius, bukan kebaruan tanpa akar budaya, bukan kebaruan latah impor dari antah berantah.

Kini, dalam rangka menuju ke masa depan "Keistimewaan Yogyakarta" tidak ada salahnya bila kita merunut dan berusaha menemukan kembali kearifan-kearifan masa lalu Yogyakarta, dan tentu saja demi masa kini kita. Yogyakarta kota andong, kota becak, kenapa tidak! \*\*\*

**Anton Haryono, Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma Yogyakarta**